

SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN POLITIK: PERSIAPAN PILKADA 2020 DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

SOCIALIZATION AND POLITICAL EDUCATION: PREPARATION FOR THE HEAD LOCALITY ELECTION IN WEST PASAMAN DISTRICT IN 2020

Riko Riyanda, Lara Indah Yandri, Tesha Dwi Putri, Khairiyah, Didi Rahmadi

Ilmu Politik Univeritas Muhammadiyah Sumatera Barat

Riyanda.fisip@gmail.com, Laraindahyandri@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan dan sosialisasi politik kepada pemilih sangat penting dilakukan oleh KPUD Pasaman Barat terutama untuk meningkatkan partisipasi pemilih masyarakat terkhusus di wilayahnya. Sebab, masyarakat yang mempunyai hak pilih perlu mengetahui dan memahami berbagai hak terkait dengan pilkada, misalnya untuk apa pemilihan diselenggarakan, apa saja tahapan-tahapan pilkada, siapa saja yang boleh ikut serta dalam pilkada, dan bagaimana tata cara menggunakan hak pilih dalam pemilu serta mengetahui dan memahami bentuk pelanggaran dalam pilkada. Para pemilih perlu mendapatkan pendidikan politik karena kehidupan politik di Indonesia saat ini masih menempatkan mereka sebagai obyek semata, termasuk target praktek politik uang. Mereka memerlukan pengetahuan mendalam mengenai hak mereka sebagai warga negara serta perlu dibantu memahami dan mencermati situasi serta kondisi politik pada level lokal maupun nasional. Salah satu pendidikan dan sosialisasi yang perlu dipahami oleh pemilih adalah bagaimana proses pemungutan suara itu dalam pemilu berjalan sehingga apa yang dipilih tidak sia-sia (golput). Metode pengabdian dilakukan dengan FGD (Focus Group Discussion) antara tim pengabdian yang dihadiri oleh seluruh mahasiswa Ilmu Politik Program Studi Ilmu Politik dengan seluruh pimpinan Komisioner KPUD Pasaman Barat. Tujuan pengabdian ini adalah: memberikan pemahaman kepada mahasiswa ilmu politik tentang pilkada yang langsung didapat dari KPUD Pasaman Barat sebagai penyelenggara, yang kedua tujuan kegiatan ini adalah terjalin kerja sama berupa (MOU) antara Prodi Ilmu Politik Dengan KPUD Pasaman Barat. Adapun hasil dari FGD ini adalah: Mahasiswa mendapatkan pencerahan seputar pendidikan dan sosialisasi politik seputar pentingnya menggunakan hak pilih. Dengan begitu, diharapkan setelah adanya sosialisasi dapat mendorong mahasiswa terlibat sebagai penyelenggara pilkada. Bisa sebagai PPK, PPS, KPPS, Pengawas TPS, saksi, dan relawan demokrasi di pilkada serentak Tahun 2020.

Kata kunci: sosialisasi, pendidikan politik, FGD, kerja sama (MOU)

ABSTRACT

Political education and outreach to voters is very important to be carried out by the West Pasaman KPUD, especially to increase voter participation, especially in its region. This is because people who have the right to vote need to know and understand various rights related to the election, for example, what the election is for, what are the stages of the pilkada, who can participate in the pilkada, and how to use their voting rights in elections and know how and understand the forms of violations in the elections. Voters need to get political education because political life in Indonesia currently still places them as mere objects, including the practice of money politics targets. They need in-depth knowledge of their rights as citizens and need assistance in understanding and observing political situations and conditions at the local and national levels. One of the education and outreach that needs to be understood by voters is how the voting process in the election runs so that what is chosen is not in vain (golput). The

service method was carried out by means of FGD (Focus Group Discussion) between the service team which was attended by all Political Science students of the Political Science Study Program with ten leaders of the West Pasaman KPUD Commissioner. The purpose of this service is: to provide understanding to political science students about the Pilkada which is directly obtained from the West Pamasan KPUD as the organizer, the second goal of this activity is to establish a cooperation (MOU) between the Political Science Study Program and the West Pasaman KPUD. The results of this FGD are: Students get insight about education and political socialization about the importance of exercising their right to vote. That way, it is hoped that after the socialization it can encourage students to be involved as election organizers. Can be PPK, PPS, KPPS, TPS Supervisor, witnesses, and democracy volunteers in the simultaneous regional elections in 2020.

Keywords: socialization, political education, FGD, cooperation (MOU)

A. PENDAHULUAN

1. Analisis Situasi

Pemilihan umum merupakan wahana keterlibatan masyarakat dalam proses politik dan bisa menjadi tolak ukur menilai demokratisnya suatu pemerintahan. Di samping itu, pemilu juga menjadi sarana legitimasi dari masyarakat terhadap pembentukan pemerintahan yang berdaulat. Dengan demikian, penyelenggaraan pemilu menjadi penting maknanya terutama bagi negara yang demokratis.

Di berbagai negara, pemilihan umum merupakan salah satu wadah yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka dalam lembaga legislatif, dan siapa yang akan memimpin mereka dalam lembaga eksekutif. Pemilihan umum juga merupakan wadah untuk menjaring orang-orang yang benar-benar bisa dan mampu untuk masuk ke dalam lingkaran elit politik, baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.

Kemudian menurut *R. William Liddle* yang menyatakan: dalam sistem pemerintahan demokrasi, pemilu sering dianggap sebagai penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktek pemerintahan oleh sejumlah elite politik. Setiap warga negara yang telah dianggap dewasa dan memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang dapat memilih wakil-wakil mereka di parlemen, pemilihan itu mencerminkan kehendak rakyat diberikan oleh seperangkat jaminan kehendak rakyat diberikan oleh seperangkat jaminan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum.

Menurut *lipaht*, sistem pemilu diartikan sebagai satu kumpulan metode atau warga masyarakat memilih para wakil mereka. Dengan pemahaman seperti itu, maka pemilu harus mampu menghasilkan para wakil yang akuntabel dan amanah terhadap yang diwakili atau rakyat (*konstituen*). Sebagaimana yang disampaikan oleh Maswadi Rauf, pemilu harus menghasilkan wakil rakyat yang akuntabel melalui sistem yang sesuai dengan tujuan tersebut.

Bagi *Aurel Crosissant* dkk, pemilu adalah kondisi yang diperlukan bagi demokrasi. Tetapi, pemilu saja tidak menjamin demokrasi, karena demokrasi memerlukan lebih dari sekedar pemilu. Namun, demokrasi perwakilan sangat tergantung pada pemilu. Pemilu bukan hanya seharusnya mencerminkan kehendak dan mengintegrasikan warga negara ke dalam proses politik saja. Melainkan juga melegitimasi dan mengontrol kekuasaan pemerintahan. Sarana penting untuk mencapai sarana-sarana ini ialah sistem pemilu.

Menurut *Benjuino Theodore*, sistem pemilihan umum adalah rangkaian aturan yang menurutnya pemilihan mengekspresikan preferensi politik mereka, dan suara dari para pemilih diterjemahkan menjadi kursi. Sementara itu menurut *Giovanni Sartori* menyatakan, sistem pemilihan umum adalah sebuah bagian yang paling esensial dari kerja sistem politik. Sistem pemilihan umum bukan hanya instrument politik yang paling mudah dimanipulasi, ia juga membentuk sistem kepartaian dan mempengaruhi *spectrum representasi*. Dan menurut Ali Murotopo, ia menyatakan pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi.

Di Indonesia, pemilihan umum telah dilaksanakan sebanyak 11 kali semenjak dari tahun 1955 sampai dengan 2014. Pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 nantinya akan berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya yang dilaksanakan di Indonesia. perbedaannya terletak pada pemilu yang akan dilaksanakan tahun 2019 dilaksanakan dengan cara serentak. Baik pemilihan anggota DPR RI, DPD, DPRD tingkat provinsi maupun kota serta pemilihan presiden dilakukan secara serentak di waktu pemilihannya.

Mengacu pada konstitusi, UU No.12/2003 menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. KPU bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu, dan wajib menyampaikan laporan tahapan penyelenggaraan pemilu kepada presiden dan DPR. Struktur organisasi penyelenggara pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang masing-masing mempunyai sekretariat.

Bagaimana dengan posisi KPUD? Sebagai bagian dari KPU, dalam konteks pemilu presiden, KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebetulnya hanya sebagai pelaksana pemilu. Namun KPUD juga punya fungsi perencanaan, penyiapan dan pelaksanaan. Lebih dari itu KPUD juga mempunyai wewenang untuk menentukan peserta pemilu dan calon-calon anggota legislatif di daerahnya masing-masing. Bahkan pada akhir pelaksanaan pemilu, KPUD juga mempunyai wewenang untuk menentukan hasil penghitungan suara sekaligus menetapkan calon-calon yang terpilih dalam pemilu di wilayahnya. Dalam konteks pemilu legislatif inilah KPUD juga berposisi sebagai penyelenggara.

Posisi KPUD sebagai penyelenggara pemilu kian jelas dalam pilkada. Memang untuk memilih gubernur/wakil gubernur, KPUD Kabupaten.Kota bertindak lebih sebagai pelaksana, karena yang punya wewenang untuk mengatur, menjadwalkan, merencanakan dan menyiapkan adalah KPU provinsi. Namun dalam pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota, posisi KPU kabupaten/kota sepenuhnya sebagai penyelenggara pilkada, sementara KPU provinsi sekadar sebagai pemantau dan tempat konsultasi.

Pada pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada Oktober tahun 2020, maka prodi ilmu politik UMSB bekerja sama dengan KPUD Pasaman Barat dalam rangka peninjauan kesiapan KPUD Pasaman Barat terhadap pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 melakukan Focus Group Discussions (FGD) dengan dengan judul sosialisasi dan pendidikan politik: persiapan pilkada 2020 di Kabupaten Pasaman Barat. Pada pilkada serentak akan disosialisasikan tugas dan fungsi (tupoksi) dari KPUD Pasaman Barat. Pemahaman terhadap pilkada dimulai dari tahapan sampai proses perhitungan suara serta hal-hal yang berkaitan dengan sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh KPUD Pasaman Barat.

Diharapkan dengan adanya FGD tentang sosialisasi dalam pilkada akan menambah pengetahuan dan wawasan mahasiswa program studi ilmu politik tentang pendidikan politik, jenis pelanggaran pemilu dan dijelaskan fungsi dari kelembagaan KPUD, Bawaslu, saksi dalam pilkada, dan lain sebagainya. Dengan begitu, mahasiswa mendapatkan pendidikan politik seputar pemilihan umum. Output diadakannya pembinaan ini pada akhirnya membuat mahasiswa antusias dalam ikut pilkada secara serentak yang akan dilakukan pada tahun 2020. Sasaran dalam pembinaan sosialisasi dan pendidikan politik ini adalah mahasiswa program studi Ilmu politik UMSB.

2. Permasalahan Mitra

Pendidikan politik dan sosialisasi politik bagi mahasiswa prodi ilmu politik UMSB urgensinya adalah persiapan menghadapi pilkada serentak serentak yang akan diadakan pada Oktober tahun 2020. Sebagai mahasiswa prodi Ilmu Politik yang baru mempelajari ilmu politik diperlukan sekali pemahaman tentang pelaksanaan pilkada. Di mulai dari tahap-tahap pilkada, tata cara pelaksanaan pilkada dan pengawasan pilkada serentak ini. Kurangnya ilmu pengetahuan mahasiswa tentang pilkada serentak akan dapat terjawab masalahnya dengan melakukan sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh KPUD dan penyampaian dari dosen ilmu politik. Dari permasalahan situasi tersebut maka pertanyaan dalam melakukan pengabdian ini adalah:

1. Bagaimana memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa ilmu politik dalam konteks sosialisasi dan pendidikan politik tentang pilkada serentak pada tahun 2020 di Kabupaten Pasaman Barat?
2. Bagaimana memberikan pemahaman tentang pendidikan politik kepada mahasiswa program studi ilmu politik ?

3. Solusi Yang Ditawarkan

1. Menyampaikan materi yang disampaikan oleh narasumber (tim pengabdian dan KPUD) dengan maksud dan tujuan tersampainya ilmu pengetahuan tentang pilkada di Pasaman Barat kepada mahasiswa.
2. Memberikan pendidikan dan sosialisasi politik sehingga makin mencerdaskan mahasiswa program studi ilmu politik.
3. Dengan diadakannya FGD ini maka diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan bisa akan terjalin kerja sama dalam bentuk MOU antara program studi ilmu politik UMSB dengan KPUD Pasaman Barat.

4. Target Luaran

No.	Jenis Luaran	Indikator capaian
1	Publikasi pada media masa (cetak/elektronik) ¹⁾	Tidak ada
2	Peningkatan omzet pada objek yang bergerak dalam bidang ekonomi ²⁾	Tidak Ada
3	Peningkatan kualitas dan kuantitas produk/jasa ²⁾	Tidak Ada
4	Peningkatan pemahaman dan keterampilan mahasiswa ²⁾	Ada
5	Jasa, model, rekayasa sosial, sistem, produk/barang ³⁾	Tidak ada
6	Hak kekayaan intelektual (paten, hak cipta, merek dagang, desain produk industri) ⁴⁾	Tidak ada

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Pelaksanaan acara kegiatan dilakukan secara diskusi dalam bentuk FGD dengan judul kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Politik: “Persiapan Pilkada 2020 di Kabupaten Pasaman Barat. Pelaksana acara kegiatan ini adalah Dosen, Tim KPUD Pasaman Barat dan Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Semester II, IV dan VI.

Rangkaian kegiatan sebelum kegiatan pengabdian di mulai, pengabdian akan mengumpulkan peserta mahasiswa ilmu politik untuk dikumpulkan di ruangan, kemudian memberikan semacam panduan tentang pelaksanaan pemilu. Tim pengabdian memberikan ceramah berbentuk sosialisasi dan pendidikan politik berupa materi tentang tahapan-tahapan pilkada. Untuk memastikan bahwa peserta paham dengan materi yang disampaikan, maka tim pengabdian memberikan waktu untuk berdiskusi dan tanya jawab.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan melihat umpan balik (*feed back*) dari peserta pembinaan dengan menanyakannya secara langsung apakah mahasiswa memahami tentang proses pilkada dan hal-hal yang berkaitan seputar pilkada. Nanti akan terlihat bagaimana antusias mahasiswa bertanya saat praktek diskusi itu berlangsung. Jika banyak yang memperhatikan dan bertanya, dari situ akan terlihat apakah peserta paham akan materi yang disampaikan.

Metode kegiatan yang dilakukan pada pengabdian ini adalah dengan metode FGD (Fokus Group Discussion), metode dalam kegiatan ini adalah peserta yang dihadiri oleh semua pimpinan komisioner dan semua dosen program studi ilmu politik. Masing masing dari narasumber KPUD menyampaikan materi sesuai dengan bidangnya. Diantaranya ada bidang sosialisidan informasi, bidang penegakan hukum, dan bagian pelaksanaan teknis dalam pilkada. Sedangkan dosen sebagai peserta juga turut menyampaikan masukan dan kritiknya kepada KPUD sebagai penyelenggara. Dan bagi mahasiswa yang menghadiri FGD tersebut selain mendengar juga aktif bertanya dan memberikan tanggapannya tentang pelaksanaan pilkada serentak yang akan di laksanakan pada tahun 2020.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini memberikan solusi terhadap masalah yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, yaitu dengan cara memberikan pengetahuan, pemahaman, dan praktek tentang pemilihan kepada daerah, yang menjadi seluruh audien dalam ruangan adalah seluruh mahasiswa Program Studi Ilmu Politik UMSB. Tahapan pembinaan ini dilakukan pada dalam waktu satu hari. Tim pengabdian melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Focus Group Discussions (FGD) tentang pengetahuan tahapan-tahapan pilkada, dan bentuk pengawasan (pelanggaran) dalam pilkada.
2. Materi Pertama meliputi: Pengenalan tentang pilkada, tahapan-tahapan pilkada serentak, syarat pemilu berkualitas, pemilu demokratis, dan KPUD sendiri menjelaskan tupoksi masing-masing pimpinan yang ada di KPUD. Ada tupoksi di bagaian hukum, sosialisasi penyeberan informasi, dan berkaitan dengan persyaratan calon pilkada.
3. Materi Kedua meliputi: tentang hakikat demokrasi, keterkaitan demokrasi dengan pilkada, hubungan antara lembaga pemilu dan bentuk pengawasannya, dan masalah dalam pemilu serentak, dan meninjau sampai sejauh mana kediapan KPUD Pasaman Barat dalam menghadapi pilkada serentak.

Adapun tujuan dari kegiatan pembinaan ini diantaranya adalah (1). Terbentuknya pemahaman oleh mahasiswa siswa ilmu politik UMSB tentang pemilihan kepala daerah yang berintegritas sesuai dengan prinsip pilkada yaitu jujur dan adil (2) Memahami tahapan-tahapan penyelenggaraan pilkada dengan baik (sosialisasi KPUD), memahami bentuk pengawasan dan segala bentuk pelanggaran yang dilakukan selama proses pilkada berlangsung (pendidikan politik) (3) Memahami peran dan fungsi KPUD Kabupaten Pasaman Barat sebagai penyelenggara pilkada di Kabupten Pasaman Barat, (4) Mendorong keterlibatan aktif mahasiswa program studi Ilmu politik UMSB dalam menyambut pilkada serentak.

Berdasarkan rangkaian kegiatan di atas, maka luaran kegiatan yang diharapkan dalam kegiatan pengabdian ini adalah:

1. Terbentuknya pemahaman oleh mahasiswa prodi ilmu politik UMSB tentang pilkada serentak dimulai dari memahami tahapan-tahapan penyelenggaraan pilkada, dimulai dari sosialisasi dari KPUD Pasaman Barat.
2. Mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam menyambut pilkada serentak misalnya menjadi petugas PPS, Panwaslu, KPPS, Pengawas TPS dan lain sebagainya.
3. Mendorong KPUD agar aktif dalam sosialisasi pilkada dengan mengajak orang-orang untuk mengkampanyekan pilkada berintegritas.

Sementara itu capaian dari pengabdian ini nantinya adalah:

1. Tersampainya ilmu pengetahuan tentang pilkada dari tim pengabdian dan KPUD Pasaman Barat kepada mahasiswa.
2. Mahasiswa aktif bertanya dan menanggapi seputar pilkada di Sumatera Barat.
3. Ada kerja sama dalam bentuk MOU antara program studi ilmu politik UMSB dengan KPUD Pasaman Barat.

Faktor pendorong dalam kegiatan pengabdian ini adalah:

1. KPUD Pasaman Barat merupakan salah satu penyelenggara dalam pilkada serentak 2020 maka sangat perlu untuk diketahui secara langsung oleh mahasiswa apa saja kendala dan hambatan yang ditemukan dalam proses penyelenggaraan pilkada.
2. Studi belajar ke KPUD Pasaman Barat adalah salah satu bentuk praktikum lapangan mahasiswa ilmu politik
3. Diharapkan setelah kegiatan FGD ini mahasiswa dapat tampil dan mengambil bagian peran dalam pelaksanaan pilkada.

Faktor penghambat dalam kegiatan pengabdian ini adalah:

1. Perjalanan yang cukup jauh dari Padang-pasaman barat, sehingga waktu jadi terbatas untuk berdiskusi panjang dengan pimpinan komisioner KPUD Pasaman Barat, karena dibatasi waktu jadi kurang maksimal waktu diskusi seputar pilkada di Kabupaten Pasaman Barat. Tetapi walaupun waktu terbatas tidak mengurangi kelancaran dan kesuksesan acara pengabdian program studi ilmu politik.

Foto Kegiatan





D. PENUTUP

Kesimpulan

Dalam rangka menghadapi pilkada serentak Tahun 2020 diperlukan sosialisasi dan pendidikan politik agar mahasiswa program studi Ilmu Politik memahami tentang proses pilkada di daerah Sumatera Barat khususnya Kabupaten Pasaman Barat. Dan selama kegiatan ini berlangsung, mahasiswa antusias dalam acara FGD di KPUD Pasaman Barat karena dapat menyanykannya langsung kepada KPUD seputar pilkada. Adanya sosialisasi dan pendidikan politik merupakan persiapan menghadapi pilkada serentak yang akan dilangsungkan beberapa bulan ke depan. Dengan begitu, diharapkan setelah adanya sosialisasi dapat mendorong mahasiswa terlibat sebagai penyelenggara pilkada. Bisa sebagai PPK, PPS, KPPS, Pengawas TPS atau saksi di pilkada serentak Tahun 2020. Dan setelah diadakannya sosialisasi dan pendidikan politik akan memberikan dampak pada semangat mahasiswa pentiingnya pilkada dan ikut berpartisipasi dan ambil bagian dalam keikutsertaannya dalam mencerdaskan pemilih untuk tidak golput dan menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2020.

Saran

1. Semoga kerja sama dengan KPUD Pasaman Barat akan terus berkelanjutan dan akan ada saling tukar informasi dan wawasan antara program studi ilmu politik UM Sumatera Barat dan KPUD Pasaman Barat
2. Dengan kegiatan ini tim pengabdian menyarankan agar KPUD Pasaman Barat terus meningkatkan integritasnya sebagai penyelenggara dan terkhusus buat mahasiswa agar selalu aktif terlibat dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik (mencerdaskan dan mengedukasi pemilih) di tengah-tengah masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Tim pengabdian mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada KPUD Pasaman Barat yang telah memberikan kesempatan kepada dosen dan mahasiswa prodi ilmu politik untuk studi belajar, dikusi dan saling tukar informasi tentang sosialisasi dan pendidikan politik pada pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian terima kasih juga kepada pihak kampus UMSB yang telah memfasilitasi bus kampus dan fasilitas lainnya sehingga acara ini berjalan lancar dan sukses.

E. DAFTAR PUSTAKA

Andrianus Pito, Toni, dkk. 2006. *Mengenal Teori Politik Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*, Bandung: Nuansa Cendekia

Budiarjo, Miriam. 2012. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Didik Supriyanto, *Menata Kembali Komisi Pemilihan Umum dalam Disain Baru Sistem Politik Indonesia*, Jurnal Politika, Vol.2 No.2 Tahun 2006 ISSN 0216-9193.

Piliang, Indra J dan Legowo TA. 2006. *Disain Baru Sistem Politik Indonesia*, Jakarta : Centre For Strategic and International Studies (CSIS).